

KEPEMIMPINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DALAM ALIH TEKNOLOGI: SEBUAH UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERTAHANAN INDONESIA

LEADERSHIP BASED ON EMPOWERMENT IN TRANSFER OF TECHNOLOGY: AN EFFORT TO INCREASE THE QUALITY OF INDONESIAN DEFENSE HUMAN RESOURCES

Jerry indrawan¹

Universitas Paramadina
(jerry.indrawan@lecturer.paramadina.ac.id)

Abstrak - Perkembangan dunia pertahanan dan keamanan global yang sedemikian cepat merupakan tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia. Untuk itu, harus ada pemenuhan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia untuk merespon tantangan tersebut. Kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan harus dimulai dari sumber daya pemimpin yang mumpuni dan siap bersaing secara global. Dalam dunia militer yang dinamis, pemimpin harus bereaksi cepat dengan wawasan yang tajam agar mampu menganalisa situasi dan mendorong anak buahnya untuk bersikap tanggap menghadapi tantangan yang muncul. Kemandirian industri pertahanan (*capability based planning*) di Indonesia menjadi *concern* utama semua *stakeholder* yang terkait di negeri ini. Jika sebuah negara mampu mandiri dalam pengadaan, maupun pengembangan industri pertahanannya, apalagi mampu meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam industri pertahanannya, posisi tawar negara tersebut pastilah lebih tinggi dalam percaturan politik internasional. Kepemimpinan menjadi penting karena bicara *capability based planning* tidak mungkin tidak diputuskan di tingkat pengambilan keputusan. Indonesia memerlukan alih teknologi (*Transfer of Technology*) untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertahanannya. Kebijakan alih teknologi juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Itulah sebabnya faktor kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan menjadi kunci kebijakan alih teknologi. Tulisan ini akan membahas bagaimana kaitan antara faktor kepemimpinan berbasis pemberdayaan dengan kebijakan alih teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia.

Kata kunci: kepemimpinan, sumber daya manusia pertahanan, industri pertahanan, dan alih teknologi

Abstract - *Rapid development in global defense and security bring Indonesia to a massive challenge. Improvement and development in terms of Indonesian defense human resource quality is imperative to answer such challenge. Quality of Indonesian defense human resources must be started from qualify leader and ready to compete globally. In a dynamic military world, leader must have quick response with sharp insight, to be able to analyse situation and encourage his people to also be responsive to face coming challenges. Self-sufficiency of defense industry (capability based planning)*

¹ Penulis adalah pengajar Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I Universitas Pertahanan Indonesia. Mengajar Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi di Universitas Tujuhbelas Agustus dan Universitas Bung Karno.

in Indonesia is a main concern for all stakeholders. Being self-sufficient in defense acquisition and development of defense industry, especially upgrading the use of sophisticated technology in defense industry, will increase Indonesia's bargaining position in international world. Leadership is important because capability based planning must be decided in decision making level. Indonesia requires Transfer of Technology policy to increase its defense human resources. Such policy related to the ability of our leaders. That is why leadership based on empowerment factor is a key of Transfer of Technology policy. This paper will discuss the relation between leadership based on empowerment with Transfer of Technology policy as a way to increase the quality of Indonesian defense human resources.

Keywords: leadership, defense human resources, defense industry, and transfer of technology

Pendahuluan

Tantangan abad ini sangat berbeda dengan tantangan-tantangan yang pernah terjadi sebelumnya. Peta dunia berubah drastis mengikuti konstelasi politik yang terjadi seiring perkembangan zaman. Perkembangan menjadikan ekonomi sebagai penentu dari berbagai aspek kegiatan, atau dengan kata lain semua aspek kegiatan bermuara pada kepentingan ekonomi. Arus globalisasi yang melanda dunia dan diwarnai oleh kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transformasi, menjadikan wajah dunia semakin transparan dan mobilitas berbagai kepentingan tanpa mengenal batas wilayah semakin meningkat.

Perkembangan ekonomi dunia yang sedemikian cepat merupakan tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia. Untuk itu, harus ada pemenuhan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia semakin menentukan dan menggeser faktor sumber daya alam yang pada beberapa dekade sebelumnya menjadi andalan. Selain itu juga akan mempengaruhi pola perilaku dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Karenanya, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan sosial yang menggoyahkan stabilitas nasional, dan akhirnya menghambat laju pembangunan.

Dalam skala global, peningkatan sumber daya manusia dalam konteks partikular sangat erat kaitannya dengan pembangunan dalam konteks universal. Pembangunan adalah sebuah proses dari penggunaan sumber daya yang efektif dan meningkatnya efisiensi bagi kegiatan produksi dan distribusi, yang menghasilkan kuantitas dan keragaman barang dan jasa dalam jumlah besar, dengan tenaga manusia yang minimal. Distribusi sumber daya dan pendapatan yang merata dan adil membentuk pembangunan

yang baik bagi semua orang. Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, seperti hak mendapatkan kesehatan, perlindungan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, sebagai minoritas, dan lain-lain.²

Konsep pembangunan di dunia modern lekat kaitannya dengan keamanan manusia (*human security*). Menurut UNDP, *human security* meliputi kebebasan dari kekurangan (*want*), yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan ketika ada krisis atau kemunduran ekonomi. Selain itu, meliputi juga kebebasan dari rasa takut (*fear*), yaitu dimana harga diri manusia dihormati, tidak hanya keselamatan fisik tetapi juga kebebasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, kebebasan untuk memilih cara menjalani hidup, dan lain-lain. Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, pembangunan menjamin pemenuhan dari konsep *human security* berjalan dengan optimal, dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.³

Ancaman terhadap *human security* berasal dari proses globalisasi yang makin menggila. Globalisasi adalah sebuah kecenderungan dimana ekonomi, finansial, teknik, dan budaya antar negara-negara sekarang ini saling bertukar dan berinteraksi dengan cepat, sehingga terkadang menerabas batas-batas nasional dan mengubah kehidupan sehari-hari dari banyak orang maupun komunitas di seluruh dunia. Interaksi-interaksi cepat ini tentunya menjadi ancaman keamanan dan pertahanan sendiri bagi Indonesia dewasa ini.

Human security ini memiliki kedekatan dengan konsep keamanan lingkungan internasional. Konsep ini adalah sebuah konsep yang sangat berkaitan dengan berakhirnya Perang Dingin. Usulan untuk menghubungkan konsep lingkungan dengan rasa ketidakamanan adalah upaya untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu-isu non-militer. Sekarang ini, lingkungan bukan lagi sesuatu yang mengontrol dan membatasi aktivitas manusia.

Rasa ketidakamanan sekarang terbatas hanya pada interaksi sosial antar manusia (*social-social*) dan ancaman kekerasan dari satu kelompok sosial terhadap yang lain, dari

² Allan Collins (ed), *Contemporary Security Studies*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 113.

³*Ibid.*, hlm. 116.

interaksi lingkungan dengan manusia (*natural-social*), yang mengancam kehidupan manusia. Isu lingkungan internasional membuat konsep keamanan tradisional menjadi kuno, dan para ahli sadar bahwa ancaman di masa depan adalah hal-hal kontemporer, seperti pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, kelangkaan sumber daya, dan melemahnya institusi sosial dan politik dalam negara.⁴

Untuk itulah, ancaman terkait *human security* harus dijawab dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Dengan peningkatan kapabilitas pemimpinnya, diharapkan sumber daya manusia pertahanan kita mampu menjawab tantangan masa depan. Tulisan ini akan membahas bagaimana kaitan antara faktor kepemimpinan dengan kebijakan alih teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Dua pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini, adalah bagaimana faktor kepemimpinan sangat penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pertahanan Indonesia, dan bagaimana kebijakan alih teknologidapat meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia, agar mampu membangun kemandirian industri pertahanan domestik Indonesia.

Sistem Pertahanan Negara

Sebelum kita membahas kepemimpinan dan peningkatan sumber daya manusia pertahanan, ada baiknya kita mengetahui dulu sedikit tentang sistem pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini searah dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara merupakan tanggungjawab dan kehormatan setiap warga negara. Sehingga tak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan

⁴ Roland Dannreuther, *International Security: The Contemporary Agenda*, (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 45.

dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.⁵

Seperti yang diatur dalam UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara yang dikembangkan adalah untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, mengintegrasikan postur pertahanan militer, dan pertahanan nirmiliter. Berdasarkan substansi tersebut, sistem pertahanan Indonesia melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan atau diistilahkan sebagai Sishankamrata (sistem pertahanan keamanan rakyat semesta) menyinergikan kekuatan pertahanan militer yang berbasis alutsista dan kekuatan pertahanan nirmiliter yang berbasis perlawanan tidak bersenjata.

Selain itu, sistem pertahanan negara juga dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman. Dipersiapkan secara dini artinya bahwa pengelolaan sumber daya nasional diarahkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman

Untuk sistem pertahanan negara dikembangkan dalam pola TriMatra Terpadu antara kekuatan matra darat, kekuatan matra laut, dan kekuatan matra udara dan dibangun dengan berbasis kemampuan (*capability based planning*) sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran dan juga ancaman. Sistem pertahanan negara berbasis kemampuan tersebut digabungkan dengan berbasis ancaman militer dari suatu negara yang potensial mengancam Indonesia (*threat based planning*). Oleh karena itu, sistem pertahanan negara harus mencerminkan kapabilitas pertahanan Indonesia dengan *deterrence standard* pertahanan negara yang melebihi tingkat *Minimum Essential Force* (MEF).⁶

⁵Budi Susilo Soepandji, "Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan", dalam <http://ikal.or.id/index.php/strategi-penguatan-sumber-daya-manusia-pertahanan.html>, 2 Oktober 2012, diunduh pada 17 Maret 2015.

⁶ Juwono Sudarsono, *Postur Pertahanan Negara*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007), hlm. 71.

Sistem sendiri adalah kumpulan dari komponen-komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya demi tujuan dan maksud yang sama. Ada proses masukan, proses, dan keluaran. Dari sudut pandang politik, proses ini dimulai dari penangkapan aspirasi masyarakat (*input*) yang diolah dan dikonversikan dalam lembaga konversi yang disebut Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sehingga disebut proses. Hasilnya berupa kebijakan (*output*) yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat.⁷

Menurut Barry Buzan, negara diidentikkan dengan istilah “pemerintah pusat”.⁸ Sedangkan menurut Joel Migdal, negara adalah sebuah organisasi yang tersusun dari beberapa agen-agen, dipimpin dan dikoordinasikan oleh kepemimpinan negara (otoritas eksekutif), yang memiliki kemampuan dan otoritas untuk membuat dan mengimplementasikan aturan yang mengikat untuk semua orang, sejalan juga dengan aturan yang mengikat untuk organisasi-organisasi sosial lainnya, di dalam sebuah wilayah tertentu, dan dapat menggunakan kekerasan untuk memastikan terselenggaranya aturan tersebut.⁹

Dalam kajian hubungan antar bangsa, negara dianalogikan sebagai sebuah organisme yang dapat tumbuh dan berkembang atau justru malah mati. Untuk dapat tetap hidup maka negara harus bisa bertahan dalam mengatasi setiap kesulitan seperti ancaman terhadap eksistensinya, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, tantangan dalam penyelesaian masalah, dan gangguan yang datang dari berbagai sektor.

Sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, dan akan terus bekerja karena secara konstans mendapat banyak input (tuntutan dan dukungan). Sistem sebagai sebuah konsep ekologis menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang dipengaruhi maupun mempengaruhi.¹⁰ Faktor lingkungan

⁷ Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, *Perbandingan Politik*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1996), hlm. 36-37.

⁸ Barry Buzan, *People States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 59.

⁹ Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in the Third World*, (New Jersey: Princeton University Press, 1988), hlm. 19.

¹⁰ Mochtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 24-25.

sangat determinan dalam proses politik, serta *output* yang dihasilkannya, seperti yang bisa kita lihat pada gambar 1 berikut ini.¹¹

Gambar 1. Proses Bekerjanya Sistem Politik dalam Sebuah Negara



Sumber: Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, *Perbandingan Politik*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1996).

Kembali ke pengertian Sistem Pertahanan Negara menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002. Menurut model sistem pertahanan negara yang dibuat oleh Syarifudin Tippe, ketiga komponen tersebut adalah *input* dalam keseluruhan proses pertahanan negara. *Input* tersebut belum diolah, ia masih baku dan mentah. Konsepsi warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya belum diproses menjadi *output* yg keluarannya adalah kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan NKRI. *Input* terdiri dari tuntutan rasa aman, tuntutan keselamatan bangsa, tuntutan integritas, kedaulatan, keutuhan NKRI, dan ancaman pertahanan negara.¹²

Gambar 2. Proses Input dan Output dalam Pertahanan Negara



Sumber: Catatan Kuliah *Indonesian National Defense System*, Unhan, 2012

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap

¹¹ Lebih lengkapnya lihat, Ikuo Kabashima dan Lynn T. White III (ed), *Political System and Change*, (New Jersey: Princeton University Press, 1986), hlm. 23-40.

¹² Dikutip dari catatan Kuliah *Indonesian Nasional Defense System* pada Universitas Pertahanan Indonesia Jakarta, 20 Juli 2012.

paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.¹³ Dalam pelaksanaannya, pertahanan nasional melibatkan seluruh warga negara, wilayah, ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemetaan geopolitik nasional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan industri pertahanan nasional.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sehingga strateginyapun merupakan strategi pertahanan total dan komponen militer dan non militer untuk menghadapi setiap ancaman.

Penyelenggaraan pertahanan negara adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dan diselenggarakan dengan membina dan mendayagunakan segenap sumber daya nasional untuk mewujudkan komponen pertahanan serta kemampuan bela negara warga negara. Pertahanan ini dimaksudkan untuk siap sewaktu-waktu menanggulangi ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non militer, dengan tetap mempertimbangkan kegunaannya untuk kesejahteraan.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya nasional (sumber daya manusianya) memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena tidak saja berguna untuk pembangunan nasional, tetapi juga untuk pertahanan negara. Dengan demikian sumber daya nasional merupakan pilar utama bagi suatu negara, baik di masa damai maupun di masa perang, baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun untuk kepentingan pertahanan negara. Begitupun dalam penyelenggaraan pertahanan negara, sumber daya manusia merupakan subyek dalam mendayagunakan sumber daya alam yang menjadi alat pertahanan negara.

¹³ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.
70 Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1

Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan Manusia

Menjawab berbagai tantangan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk maksimalisasi potensi sumber daya nasional (manusia), kita membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Akan tetapi, bicara pentingnya peningkatan sumber daya manusia di bidang pertahanan, kita tidak akan bisa memulainya tanpa bicara terlebih dahulu kualitas pemimpinnya. Pengembangan kualitas sumber daya manusia perlu direncanakan secara konseptual dan terarah melalui rekayasa sosial, termasuk di bidang pertahanan.

Teknologi pertahanan, terutama membutuhkan rekayasa sosial, serta rencana konseptual jangka panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan tidak bisa asal jadi, berorientasi sempit (jangka pendek), apalagi tidak didukung kualitas pemimpinnya. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia nantinya di bidang pertahanan harus dimulai dari sumber daya pemimpin yang mumpuni dan siap bersaing secara global. Atas dasar ini juga, pembinaan terhadap sumber daya nasional, khususnya pada kader pimpinan bangsa semakin mendesak.

Kepemimpinan bangsa secara umum, adalah mereka yang memiliki kapasitas dapat mempengaruhi masyarakat serta jalannya pembangunan melalui kebijaksanaan. Konsep pemikiran maupun tindakannya, baik sebagai pemimpin formal maupun informal, dapat memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam konteks peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang teknologi pertahanan. Untuk itu, kepemimpinan yang optimal bagi sektor pertahanan Indonesia di masa depan harus berbasis pemberdayaan manusia, dalam hal ini semua kalangan yang terlibat di sektor industri pertahanan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya suatu masyarakat di mana setiap individu memiliki kesadaran akan peran dan aktivitasnya dalam suatu kelompok masyarakat bangsa dan negara. Memiliki daya kritis untuk ikut berperan dalam membangun bangsa dan negara yang didasari pada persamaan hak dan kewajiban selaku warga negara, kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan mengedepankan hak asasi manusia dalam kehidupannya yang demokratis dan egaliter.

Dengan kata lain, adanya partisipasi, kesamaan, kesederajatan selaku manusia dan warga negara dalam membangun bangsa dan negara.

Model kepemimpinan berbasis pemberdayaan manusia merupakan reformasi dari pola kepemimpinan yang berdasar kekuasaan jabatan (*position power*) menjadi kepemimpinan berdasarkan aspirasi rakyat (demokrasi), dengan mengoptimalkan potensi rakyat. Hal ini membuat unsur kepemimpinan bersama (*power sharing*) yang didasari akuntabilitas dari pemimpin, kewenangan yang terbagi dan terdistribusi ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Para politisi kita harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan di atas agar kebijakan yang dihasilkan di bidang pertahanan memang berdasarkan kebutuhan TNI kita, bukan karena hitung-hitungan politis.

Jika kondisi ini terjadi, dipastikan akan menghasilkan keluaran yang jauh lebih optimal dan sikap partisipatif, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab yang berkembang secara *bottom up*. Dalam prakteknya, model kepemimpinan seperti ini akan makin efektif jika didukung oleh bentuk organisasi yang lebih datar, efisien, memangkas birokrasi yang tidak perlu dan memperpendek jalur komunikasi menuju ke atas atau sebaliknya.¹⁴ Industri pertahanan membutuhkan gerak cepat dalam modernisasi alutsista, untuk itu birokrasi yang berbelit akan menyulitkan kinerja sumber daya manusia yang bekerja di bidang itu.

Bila model kepemimpinan tersebut diberdayakan, maka organisasi akan lebih dapat melaksanakan program dan kegiatan yang lebih efektif, serta efisien dengan hasil akhir yang optimal. Produktivitas akan meningkat, *turnover* mengecil serta kemubaziran menjadi minimal. Proses yang demikian merupakan konsep kepemimpinan masa depan yang diharapkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepemimpinan bukan lagi merupakan suatu wilayah dan tataran eksekutif yang berada di puncak sebagai bos besar dengan segudang kekuasaan dan kewenangan.

¹⁴ Agus Wirahadikusumah, dkk, *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 28.

2. Seorang pemimpin harus memfasilitasi anggota organisasi menuju kesempurnaan. Pemimpin harus mampu mendorong kinerja terbaik setiap anggota organisasi agar sinergis dengan cita-cita organisasi.
3. Pemimpin masa depan adalah seorang manajer dengan kadar kepemimpinan yang jauh lebih menonjol ketimbang kemampuan manajerialnya.
4. Kepemimpinan di masa depan harus lebih responsif dan humanistik, memiliki rasa peduli yang besar terhadap kemanusiaan dan masyarakat luas.
5. Kepemimpinan masa depan mengutamakan pendekatan holistik, dengan memadukan kualitas, kemampuan, dan ketrampilan yang didasari moral dan etika.
6. Kepemimpinan masa depan harus mampu dan tanggap terhadap munculnya perubahan. Harus proaktif, bahkan jika perlu pemimpin harus mendorong terjadinya perubahan yang diarahkan untuk pencapaian cita-cita nasional.¹⁵

Untuk itu diperlukan pemimpin yang baik, memiliki wawasan jauh ke depan, mampu mengantisipasi kendala yang dihadapi, menemukan hal-hal penting (inovatif) yang tidak dapat dilihat atau dibayangkan oleh orang lain sebagai peluang. Seorang pemimpin yang tanpa wawasan hanya akan mampu bereaksi terhadap situasi yang muncul seketika, itupun sering terlambat. Tidak mampu membaca tanda-tanda akan munculnya suatu perubahan.

Kualitas wawasan seorang pemimpin didapatkan melalui pendidikan, pengalaman, tingkat intelektual, serta kemampuan berinteraksi dengan pemimpin lain sebagai prasyarat. Dalam dunia militer yang sangat dinamis, pemimpin harus bereaksi cepat dengan wawasan yang tajam agar mampu menganalisa situasi dan mendorong anak buahnya untuk bersikap tanggap pula menghadapi tantangan yang muncul. Tipe kepemimpinan berbasis pemberdayaan harus menjawab kompleksitas dan dinamisasi dunia militer yang bergerak sangat cepat. Tanpa pemberdayaan manusia pertahanan Indonesia, kualitas seorang pemimpin sehebat apapun, semua akan sia-sia.

Menurut Peter dan Austin, memimpin adalah bagaimana kita memotivasi, menginspirasi. Membawa orang lain ke tingkat yang lebih tinggi, bekerja sama dengan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28-29.

anak buah untuk mencari solusi dari sebuah problem, mendorong mereka meraih prestasi yang lebih tinggi, mengedepankan sikap membimbing daripada memerintah, dan bagaimana seorang pemimpin berjalan bersama anak-anak buahnya.¹⁶

Lebih lanjut, Peters dan Austin menambahkan bahwa kepemimpinan adalah menyatukan orang-orang dengan bakat, latar belakang, pengalaman, dan keinginan yang berbeda, dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab, terus meraih prestasi, serta memperlakukan mereka sebagai rekan kerja. Kepemimpinan bukan soal teknik atau metode-metode kerja, tapi bagaimana seorang pemimpin benar-benar memperhatikan anak buahnya, percaya pada mereka, serta melibatkan mereka dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁷

Tentunya *personality traits* di atas wajib dimiliki pemimpin-pemimpin militer dan sipil supaya mampu meningkatkan kualitas sumber daya pertahanan kita. Dengan bekerja sama dengan anak buah mencari solusi dari problem, mendorong mereka meraih prestasi yang lebih tinggi dari apa yang mereka sudah hasilkan, dan bersikap membimbing, bukan memerintah, para pemimpin adalah jembatan kesuksesan bangsa. Tipe kepemimpinan seperti inilah yang penulis sebut kepemimpinan berbasis pemberdayaan. Dengan ini, kualitas sumber daya pertahanan kita semakin handal karena dibimbing oleh sumber daya kepemimpinan yang baik.

Peningkatan Kapasitas Teknologi Pertahanan

Kemandirian industri pertahanan (*capability based planning*) di Indonesia menjadi *concern* utama semua *stakeholder* yang terkait di negeri ini. Jika sebuah negara mampu mandiri dalam pengadaan, maupun mengembangkan industri pertahanannya, apalagi mampu meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam industri pertahanannya, posisi tawar negara tersebut pastilah lebih tinggi dalam percaturan politik internasional. Tentunya kita mengharapkan Indonesia mampu menjadi negara dengan *bargaining position* kuat, dengan berbasiskan kemandirian industri pertahanan dan teknologi kemiliterannya. Ketergantungan terhadap negara lain memang harus dihilangkan,

¹⁶ Tom Peters dan Nancy Austin, *A Passion for Excellence- the Leadership Difference*, (New York: Random House, 1985), hlm. 28.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 30

terutama untuk sektor pertahanan. Kemandirian adalah kata kunci. Dalam konteks penyediaan kualitas, maupun kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik wilayah di Indonesia, kebutuhannya harus mampu dipenuhi oleh industri nasional.

Faktor kepemimpinan menjadi penting karena bicara *capability based planning* tidak mungkin tidak diputuskan di tingkatan pengambilan keputusan. Selama ini, sektor pengambilan keputusan penulis nilai menjadi salah satu titik lemah dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor pertahanan dan keamanan. Terkadang pengambilan keputusan di tingkat atas tidak sesuai dengan kebutuhan di bawah. Proses pengambilan keputusan tidak didasarkan pemberdayaan kualitas SDM yang memadai. Biasanya terjadi karena banyaknya intervensi politik dari para politisi sipil yang sebenarnya tidak terlalu paham dengan kebutuhan pertahanan kita.

Baiknya kita mengambil contoh bagaimana pembelian tank Leopard ditentang habis-habisan oleh para politisi-politisi, maupun pihak-pihak yang tidak terlalu paham pertahanan dan keamanan. Banyak alasan dikemukakan, antara lain ketidaksesuaian medan tempur dan bobot tank yang terlalu berat.¹⁸ Padahal, setiap rencana pembelian alutsista (*defense acquisition*) yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan, selalu melalui permintaan dari setiap matra karena merekalah yang tahu kebutuhannya masing-masing.

Karena sebab-sebab itulah penulis merasa bahwa faktor kepemimpinan di tubuh lembaga-lembaga *stake holder* pertahanan Indonesia memegang faktor kunci kemandirian industri pertahanan kita. Kemandirian industri berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan, maupun perkembangan teknologinya. Peningkatan teknologi pertahanan tidak bisa tidak harus dimulai dari kualitas sumber daya manusianya dulu.

Kita lihat dua negara dengan perkembangan teknologi militer tercepat di dunia, yaitu India dan Tiongkok. Mereka dapat membangun industri pertahanannya sendiri yang mandiri dan *self-reliable*. Inti dari modernisasi alutsista dan pembangunan sistem pertahanan yang terintegrasi dua negara maju ini adalah pembinaan maksimal pada industri pertahanan domestiknya. Fokus pada pembinaan industri pertahanan mandiri ala

¹⁸ Tribun, "Alasan Tank Leopard Tidak Layak Dibeli," dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/19/tank-leopard-tidak-layak-dibeli>, 19 Januari 2012, diunduh pada 16 Maret 2015.

India dan Tiongkok ini harus mampu kita tiru bagi pengembangan industri pertahanan di Indonesia. Jika berhasil, kita bisa suatu saat sejajar dengan mereka yang sekarang ini sudah menjadi kekuatan militer utama di Asia, bahkan salah dua yang terbaik di dunia.

Selain fokus pada pembinaan industri pertahanan, *political will* dari pemerintah dua negara ini juga kuat. Proses pengambilan keputusannya cepat dan tepat, serta tidak berbelit-belit tersandera birokrasi. Kita lihat profil pemimpin-pemimpin Tiongkok yang keras, sampai kejahatan korupsi saja dihukum mati. India dengan perhatian pada peningkatan anggaran militernya membuat dunia internasional tidak lagi memandangi sebelah mata negerinya Gandhi tersebut. Ini semua dimulai dari kepemimpinan yang tangguh, yang harus kita adopsi.

Pola kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan adalah yang seperti Tiongkok dan India lakukan. Pemimpinnya percaya terhadap kualitas sumber daya manusianya. India dan Tiongkok mengirimkan SDM-SDM terbaik mereka untuk belajar ke seluruh dunia. Setelah itu, mereka kembali ke negaranya masing-masing untuk mengaplikasikan teknologi dan *skill* yang mereka dapatkan di luar negeri. Pemimpin-pemimpin dua negara ini sadar bahwa kekuatan utama kemandirian industri pertahanan mereka adalah melalui pemberdayaan para anak buahnya. Hal ini karena merekalah ujung tombak negara yang paling strategis.

Bicara adopsi, langkah India dan Tiongkok sebenarnya sudah mulai kita tiru. Indonesia sudah mulai melakukan peningkatan program pemenuhan *Minimum Essential Force*(MEF) dengan menerbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, sebagai legalitas bagi peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pengembangan terhadap kemampuan dan kapabilitas industri pertahanan di Indonesia agar mampu bersaing di era global ini.

Jika kita perhatikan pasal 3 undang-undang tersebut, ada beberapa kalimat menarik yang perlu kita cermati. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah memiliki komitmen dan keinginan politik untuk mengembangkan, dan juga memastikan bahwa industri pertahanan dalam negeri dapat menjadi salah satu sektor penting bagi prioritas pembangunan bangsa. Kalimat-kalimat tersebut, misalnya: mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; mewujudkan

kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi alat pertahanan dan keamanan, serta jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal.

Pada tahun 1990-an, Indonesia mengalami embargo senjata oleh Amerika Serikat dikarenakan masalah-masalah yang terkait hak asasi manusia. Kondisi ini menjadi semacam “*wake up call*” bagi pemerintah untuk kemudian menyadari bahwa kemandirian industri pertahanan ternyata sangat penting untuk berjaga-jaga menghadapi situasi seperti ini. Termasuk juga berkembangnya industri-industri strategis yang amat signifikan bagi keberadaan sistem pertahanan di Indonesia.

Industri-industri strategis semacam ini, yang bergerak di bidang pertahanan, adalah PT. Pindad, PT. PAL, dan PT. DI. Ketiga perusahaan plat merah ini telah sangat berpengalaman dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan sistem pertahanan di Indonesia. Hanya saja, fungsi perusahaan-perusahaan BUMN ini belum terlalu maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan Indonesia, bahkan untuk sekedar mencapai *minimum essential force*.

Produk industri pertahanan di Indonesia sebenarnya cukup memiliki nama baik dan reputasi di dunia internasional. Contohnya, PT. Pindad yang mampu memproduksi berbagai varian senapan serbu SS. Senapan jenis ini sering memenangkan lomba menembak internasional sehingga membawa harum nama bangsa. PT. Pindad terus melakukan pengembangan dan peningkatan produksi senapan jenis SS ke dalam beberapa tipe-tipe inovatif lainnya untuk digunakan sebagai senjata organik TNI dan Polri, maupun diekspor ke negara lain.

Selain itu, PT. Pindad juga membuat panser Anoa yang sering digunakan oleh Kontingen Garuda dalam berbagai misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai negara. Diharapkan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, produk teknologi persenjataan Indonesia dapat diperkenalkan ke tingkat internasional, sehingga mampu bersaing dengan teknologi-teknologi persenjataan global.

PT. DI juga tak mau kalah, dengan membuat pesawat intai maritim yang telah diekspor ke berbagai negara. Begitu juga PT. PAL. Keberhasilan mereka dalam

memproduksi beberapa kapal patroli yang digunakan jajaran TNI AL juga patut dipresiasi. Yang termukhtahir adalah produksi KRI Klewang kelas Sigma, yaitu sebuah kapal perang dengan teknologi siluman (*stealth*). Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan PT. PAL untuk merancang dan mengembangkan persenjataan, khususnya bagi matra laut, yang efektif dan efisien bagi industri pertahanan domestik kita. Ke depan, pengadaan kapal-kapal bagi operasional TNI AL tidak boleh lagi didatangkan dari luar, tetapi diupayakan dapat diproduksi di dalam negeri. Begitu pula bagi semua kebutuhan alutsisa ketiga matra kita, darat, laut, dan udara. Problem ketidakmampuan memproduksi terkait teknologi dapat diselesaikan dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia kita di bidang pertahanan.

Alih teknologi atau ToT (*Transfer of Technology*) adalah kebijakan yang harus kita galakkan agar alutsista kita dapat berbicara di mata dunia, dan tentunya tidak lagi tergantung negara-negara produksi persenjataan besar dunia. Untuk itu, sangatlah diperlukan tipe kepemimpinan berbasis pemberdayaan sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Pemimpin-pemimpin kita harus memprioritaskan pemberdayaan anak-anak buahnya, contohnya seperti mengirimkan SDM-SDM terbaik kita untuk belajar teknologi pertahanan di luar negeri, agar nantinya bermanfaat untuk diterapkan di Indonesia.

Peningkatan SDM Pertahanan Negara melalui Alih Teknologi

Sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan negara lain, khususnya untuk memproduksi alutsista sendiri. Berbekal kemampuan sumber daya manusianya, harusnya kemandirian industri pertahanan dapat segera terwujud, begitu pula dengan peningkatan kualitas produksinya. Problemnya adalah teknologi pertahanan adalah sebuah jenis teknologi yang tidak serta merta dipelajari sendiri, lalu diaplikasikan. Banyak variabel yang membuat teknologi pertahanan tidak bisa berjalan seorang diri.

Menjawab tantangan ini, diperlukan yang namanya alih teknologi (*Transfer of Technology*). Alih teknologi membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), *brainware*, dan jaringan pendukung (*supporting network*). Perangkat keras berhubungan dengan peralatan fisik

dan struktur komponennya. Perangkat lunak adalah bagaimana cara untuk mengetahuinya, lalu melakukannya (*know-how*). Selain itu, diperlukan juga pengetahuan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau perintah dalam operasional alatnya. *Brainware* adalah pengetahuan mengenai kaitan tentang seluk beluk dan pengertian mengenai aplikasi dan penggunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang ditransfer tadi. Sedangkan, jaringan pendukung adalah jaringan yang berguna untuk mendukung penggunaan secara efektif dalam proses manajerial teknologi-teknologi yang ditransfer tersebut.¹⁹

Alih teknologi dewasa ini dapat menjadi jaminan pemerintah dalam melakukan dan mengembangkan kerjasama militer dengan negara lain. Klausul alih teknologi harus disertakan sebagai upaya mengembangkan alutsista dalam negeri. Alih teknologi dapat membantu sumber daya manusia pertahanan Indonesia untuk mampu menerapkan dan memproduksi persenjataan sesuai standar internasional. Jika alih teknologi diterapkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan kita akan terjamin karena sudah memiliki pengetahuan untuk memproduksi, tidak hanya menerapkan. Apalagi, industri-industri strategis pertahanan kita sudah dalam taraf yang menjanjikan untuk mengimplementasikan sistem alih teknologi ini.

Alih teknologi adalah bagian dari kerjasama pertahanan atau militer antarnegara. Sebagai negara yang baru memulai langkah-langkah peningkatan dan kemandirian industri pertahanannya, Indonesia juga harus mampu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara maju di bidang pertahanan. Akan tetapi, bentuk kerjasamanya harus yang menguntungkan Indonesia, serta menerapkan syarat alih teknologi itu tadi. Bentuk kerjasama yang menguntungkan tadi adalah dalam kerangka bentuk pengembangan bersama (*co-development*). Bentuk ini adalah mekanisme kerjasama antara pemerintah dan perusahaan internasional yang melakukan pengembangan dan produksi sistem persenjataan, termasuk evaluasi, biaya bersama, dan pembagian keuntungan melalui penjualan dari produksi persenjataan itu.²⁰

¹⁹ Mohammed Saad, *Development Through Technology Transfer: New Organizational and Cultural Understanding*, (Bristol: Intellect, 2000), hlm. 33.

²⁰ Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Pengantar Kajian Strategis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 111.

Globalisasi dewasa ini membawa dampak bagi interdependensi antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk bidang pertahanan. Negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan internasional bidang pertahanan dapat memberikan mekanisme alih teknologi kepada Indonesia dalam tataran teknis, yaitu untuk melakukan efisiensi produksi, serta dalam tataran politik, untuk mendekatkan hubungan antarkedua negara. Selain itu, alih teknologi juga dapat dilakukan antara negara-negara berkembang. Tujuannya adalah, selain mempererat kerjasama antar negara-negara tersebut, dapat juga untuk saling mengisi kekurangan dari teknologi yang dikembangkan.

Alih teknologi adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertahanannya. Alih teknologi juga dapat membangun sistem pertahanan yang sesuai dengan kondisi alutsista yang dimiliki TNI, serta pas dengan kondisi kewilayahan dan kebutuhan TNI sendiri. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan alih teknologi ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk setidaknya pemenuhan *minimum essential force* terlebih dulu. Artinya, kerjasama pertahanan yang menyertakan klausul alih teknologi, harus dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan alutsista yang sesuai dengan doktrin sistem pertahanan kita secara *general*.

Alih teknologi juga bukan berarti kita bisa mengambil teknologi secara asal-asalan dari negara mana saja yang mau bekerjasama dengan kita. Sebagai contoh, teknologi negara-negara Barat tentunya beda dengan teknologi yang dikembangkan negara-negara Timur, seperti Rusia. Paradigma kanibalisme alutsista sudah tidak bisa lagi dilakukan. Paradigma modernisasi alutsista kita harus jelas berkiblat ke mana. Barat atau timur, atau jika ingin ekstrim lagi, kita buat teknologi sendiri, sekalipun tentunya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan kapal-kapal laut buatan Soviet dulu, dan di sisi lainnya kita membeli pesawat F-16 atau Grippen dari negara barat. Untuk itu, alih teknologi harus disertai kebijakan holistik terkait doktrin sistem pertahanan Indonesia, sehingga kesatuan unit tempur kita nanti terintegrasi dengan optimal.

Kembali ke masalah kerjasama pertahanan, PT. Pindad sebagai perusahaan plat merah strategis dalam industri pertahanan domestik telah melakukan kerjasama dengan Fabrique Nationale Herstal Belgia. Senapan serbu SS-1 (dan SS-2 sebagai

pengembangannya) adalah hasil dari kerjasama PT. Pindad dengan FN Belgia ini.²¹ Produksi SS-1 didasarkan pada platform senapan serbu FNC buatan perusahaan Belgia tersebut. Varian dari senapan SS-1 pun diproduksi oleh PT. Pindad, tidak hanya untuk konsumsi domestik, tapi juga untuk ekspor ke berbagai negara.

PT. Pindad menjadi BUMN strategis dalam industri pertahanan Indonesia yang siap menjadi penerima alih teknologi pertahanan dari negara lain. Surat Keputusan Direksi No. Skep/3/P/BD/X/2005 mengenai Kebijakan Alih Teknologi adalah komitmen PT. Pindad sebagai salah satu BUMN strategis dalam penyediaan dan pengembangan alutsista TNI.²² Dengan banyaknya alutsista yang didatangkan dari luar negeri, PT. Pindad harus mampu memproduksi amunisi dan suku cadang bagi alutsista tersebut. Kondisi ini sejalan dengan tuntutan alih teknologi yang dimasukkan pemerintah Indonesia dalam setiap pembelian persenjataan dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu contohnya adalah pembelian tank Leopard. Kedatangan tank-tank besar ini membuka jalan bagi Indonesia untuk melakukan alih teknologi, sekalipun dalam masa ini hanya sekedar produksi suku cadang maupun amunisinya saja dulu.²³ Langkah PT. Pindad ini bisa penulis kategorikan sebagai salah satu contoh awalan dari tipe kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan.

PT. DI juga memiliki kemampuan memproduksi berbagai pesawat terbang yang sebenarnya adalah merupakan hasil alih teknologi. Sebelum bernama PT. DI, perusahaan ini bernama IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), dimana mereka telah memproduksi pesawat terbang yang didasarkan pada rancangan dari EADS Cassa Spanyol.²⁴ Setelah berhasil menerapkan desain dan produksi, PT. DI mengembangkan rancangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan menggunakan merk CN pada setiap varian pesawat yang diproduksinya, baik untuk kepentingan sipil maupun militer.

²¹ Korem-043-gatam, "Senapan Serbu 2 Produksi PT Pindad", dalam <http://korem-043-gatam.mil.id/info-militer/senjata-produksi-pt-pindad?format=pdf>, 9 September 2011, diunduh pada 10 Maret 2015.

²² Pindad, "Surat Keputusan Nomor: Skep/3/P/BD/X/2005 tentang Kebijakan Alih Teknologi", dalam www.pindad.com/downloads/division/Kebijakan_Alih_Teknologi.pdf, 17 Oktober 2005, diunduh pada 16 Maret 2015.

²³ Pindad, "Pindad Siap Produksi Peluru Tank Leopard", dalam <http://pindad.co.id/pindad-siap-produksi-peluru-tank-leopard>, 6 Juni 2014, diunduh pada 16 Maret 2015.

²⁴ Antara, "PT DI Gandeng EADS-CASA Produksi Pesawat C295", dalam <http://www.antaraneews.com/berita/247301/pt-di-gandeng-eads-casa-produksi-pesawat-c295>, 23 Februari 2011, diunduh pada 10 Maret 2015.

Menurut penulis, kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan adalah yang sejauh ini paling baik terkait dengan kebijakan alih teknologi. Selain itu, secara kuantitas bisa disebutkan bahwa Korea Selatan adalah partner kerjasama pertahanan Indonesia yang terbesar mengalahkan Rusia dan Amerika. Paling tidak ada empat kerjasama pertahanan antara kita dengan Korea Selatan yang dimulai tahun 2004 lalu.²⁵

Pertama, adalah pembuatan 4 unit kapal perang Landing Platform Dock (LPD) Makassar Class pada tahun 2004. Dalam kerjasama ini, Indonesia membeli 4 unit kapal perang LPD Makassar Class, di mana 2 unit pertama dikerjakan di Korea Selatan dan sisanya dikerjakan di PT PAL di Surabaya Indonesia. Pengerjaan 2 unit kapal perang LPD Makassar Class di Indonesia ini merupakan bagian dari alih teknologi Korea. 2 unit kapal perang LPD Makassar Class ini dikerjakan ahli perkapalan Indonesia dengan bantuan ahli perkapalan dari Korea Selatan. Dan saat ini, 4 unit kapal perang LPD Makassar Class ini menjadi andalan Militer Indonesia dalam memobilisasi kekuatannya keseluruhan wilayah Indonesia.

Kapal perang Landing Platform Dock (LPD) sendiri adalah kapal perang yang memiliki kemampuan mengangkut berbagai kendaraan militer seperti kendaraan amfibi, tank amfibi dan lainnya serta mendaratkannya di tepi pantai musuh. Kendaraan dan tank amfibi ini sendiri akan bergerak menuju pantai menggunakan kemampuannya berenang di tepi pantai. Selain kendaraan militer, kapal perang ini juga mampu mengangkut pasukan militer dalam jumlah yang besar.

Kedua, 3 unit Kapal Selam Indonesia DSME-209. Pembuatan Kapal Selam Indonesia ini pun sebagian akan dikerjakan di Korea Selatan dan sebagian lagi di kerjakan di Indonesia sebagai bagian alih teknologi. Indonesia sendiri membeli 3 unit Kapal Selam Improved Chang Bogo alias DSME-209 dari Korea Selatan pada tahun 2011 lalu dengan nilai kontrak sekitar \$1.1 Miliar. Dua unit kapal selam Indonesia ini akan dikerjakan di Korea Selatan, dimana unit pertama akan dikerjakan seluruhnya oleh ahli Korea Selatan. Lalu unit kedua akan dikerjakan juga di Korea Selatan dengan melibatkan ahli Korea Selatan dan Indonesia. Sedangkan unit ketiga kapal selam Indonesia ini akan dikerjakan di

²⁵ Militer Indonesia, "4 Kerjasama Militer Indonesia dengan Korea Selatan", dalam http://militerindonesia.net/read/43/4_Kerjasama_Militer_Indonesia_dengan_Korea_Selatan_1, 1 Maret 2015, diunduh pada 17 Maret 2015.

Indonesia oleh tenaga ahli Indonesia dengan dibantu oleh ahli dari Korea Selatan. Ketiga unit Kapal selam Indonesia akan melengkapi daftar alutsista TNI mulai pada tahun 2016 sampai 2018 mendatang. Saat ini proses pengerjaan kapal selam sedang berlangsung di Korea Selatan dan unit pertama baru akan selesai di tahun 2016, unit kedua di tahun 2017 dan unit ketiga pada tahun 2018.

Ketiga, pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan bisa disebut sebagai kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan yang paling besar. Hal ini karena nilai kerjasama militer ini sangat besar mencapai puluhan juta dolar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki kerjasama pertahanan yang sangat erat sekali. Kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini dilakukan Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2011 lalu, dimana Indonesia akan menanggung 20% biaya pengembangan dan sisanya 80% akan di tanggung pemerintah Korea Selatan. Pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini akan menghasilkan pesawat tempur generasi 4.5 yang lebih canggih dari F-16 Fighting Falcon namun tidak lebih baik dari F-32 Lightning II.

Pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini sendiri sudah memasuki tahap EMD pada tahun 2015 ini, setelah menyelesaikan tahap *Technical Development Phase* pada tahun 2012 lalu. Selanjutnya akan diteruskan ketahap pembuatan prototype dan testing sampai dengan tahun 2023 mendatang. Dan harapannya adalah pada tahun 2025 mendatang, pesawat tempur ini sudah bisa di produksi dan sudah bisa dipakai oleh kedua negara. Korea Selatan dikabarkan berkomitmen untuk membeli 120-150 unit pesawat tempur KFX/IFX ini, sedangkan Indonesia dikabarkan berkomitmen untuk membeli 50-80 unit pesawat tempur KFX/IFX.

Keempat, pembelian 22 unit panser pengangkut pasukan yang sering disebut dengan panser Tarantula. Di Korea Selatan, panser Tarantula ini memiliki nama resmi Black Fox. Mirip dengan kerjasama sebelumnya, sebagian panser ini juga dikerjakan di Indonesia sebagai bagian dari alih teknologi Korea Selatan ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa 11 unit dari Panser Canon Tarantula dikerjakan di Indonesia dan sudah selesai serta sudah dikirimkan ke Indonesia pada tahun 2013 lalu. Sedangkan 11 unit panser Canon Tarantula ini akan dikerjakan di Indonesia oleh PT Pindad di Bandung dengan dibantu ahli dari Korea Selatan.

Demikianlah 4 kerjasama militer Indonesia dengan Korea Selatan yang sudah dan sedang dikerjakan oleh kedua negara sampai saat ini. Dari 4 kerjasama militer ini saja, nilainya sudah mencapai puluhan miliar dolar, sehingga wajar jika disebut bahwa kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan sangat penting sekali dan sedikit banyak turut membantu memodernisasi militer Indonesia.

Kebijakan alih teknologi dengan Korea Selatan ini sangat bermanfaat dalam mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Kesempatan belajar dari teknisi-teknisi Korea Selatan terkait teknologi militer, tentunya dapat meningkatkan kualitas sumber daya pertahanan Indonesia. PT. DI di proyek ini bertindak sebagai pelaksana teknisnya, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh kesempatan mempelajari berbagai macam teknologi pembuatan alutsista. Pemimpin-pemimpin kita harus memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk mengedepankan tipe kepemimpinan berbasis pemberdayaan dalam kebijakan alih teknologi antara kita dengan Korea Selatan.

Di sektor maritim, jumlah dua kapal selam yang dimiliki Indonesia sangat jauh dari cukup, apalagi kapal-kapal itu juga kapal tua buatan Soviet. Untuk itu, terkait pembuatan kapal selam, PT. PAL menjadi mitra bagi perusahaan Korea Selatan untuk melakukan produksi bersama kapal selam tersebut bagi pemenuhan kebutuhan tempur TNI AL. Bagi negara maritim seperti kita, alih teknologi di bidang kelautan, terutama untuk TNI AL, sangatlah penting. Kapal selam menjadi elemen penting bagi pengamanan wilayah kelautan Indonesia yang sangat luas. Memang menjadi keprihatinan kita bersama jika pengadaan kapal selam seringkali terhambat masalah anggaran, padahal kebutuhan akan alutsista ini sangat krusial berdasarkan potensi geografis kita. Diharapkan produksi mandiri alutsista kelautan di kemudian hari dapat menjawab masalah terkait kurangnya kuantitas dan kualitas kapal-kapal selam kita.

Terakhir, kebijakan alih teknologi juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Ketergantungan pada teknologi asing membuat industri pertahanan kita tidak mandiri dan sumber daya manusianya stagnan. Hal ini disebabkan kurangnya posisi tawar kita terhadap negara-negara asing tersebut, karena kepemimpinan kita pun lemah. Kita tidak berani memaksa negara-negara tersebut untuk

sepakat melakukan alih teknologi kepada kita. Kita lebih banyak menyerah kepada intervensi asing.

Itulah sebabnya faktor kepemimpinan berbasis pemberdayaan menjadi kunci kebijakan alih teknologi. Kebijakan alih teknologi adalah kunci peningkatan sumber daya manusia pertahanan. Dan peningkatan sumber daya pertahanan berbasis pemberdayaan manusia adalah kunci kualitas teknologi pertahanan Indonesia. Tanpa kepemimpinan yang kuat, mustahil sumber daya manusia pertahanan kita bisa berkualitas. Mustahil juga kita mampu mandiri dalam pengembangan teknologi pertahanan kita. Penulis harap para pemimpin-pemimpin Indonesia yang menjadi pemangku kebijakan di sektor pertahanan dapat meningkatkan *bargaining position* mereka di dunia internasional, agar kebijakan-kebijakan pertahanan yang dihasilkan dapat membawa lebih banyak manfaat bagi peningkatan teknologi dan kemandirian industri pertahanan kita.

Kesimpulan

Ancaman terkait *human security* harus dijawab dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Dengan peningkatan kapabilitas pemimpinnya, diharapkan sumber daya manusia pertahanan kita mampu menjawab tantangan masa depan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia perlu direncanakan secara konseptual dan terarah melalui rekayasa sosial, termasuk di bidang pertahanan. Teknologi pertahanan terutamanya, membutuhkan rekayasa sosial, serta rencana konseptual jangka panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan tidak bisa asal jadi, berorientasi sempit (jangka pendek), apalagi tidak didukung kualitas pemimpinnya. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia nantinya di bidang pertahanan harus dimulai dari sumber daya pemimpin yang mumpuni dan siap bersaing secara global. Atas dasar ini juga, pembinaan terhadap sumber daya nasional, khususnya pada kader pimpinan bangsa semakin mendesak.

Model kepemimpinan berbasis pemberdayaan manusia merupakan reformasi dari pola kepemimpinan yang berdasar kekuasaan jabatan menjadi kepemimpinan berdasarkan aspirasi rakyat, dengan mengoptimalkan potensi rakyat. Hal ini membuat unsur kepemimpinan bersama yang didasari akuntabilitas dari pemimpin, kewenangan

yang terbagi dan terdistribusi ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Para politisi kita harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan di atas agar kebijakan yang dihasilkan di bidang pertahanan memang berdasarkan kebutuhan TNI kita, bukan karena hitung-hitungan politis. Faktor kepemimpinan menjadi penting karena bicara *capability based planning* tidak mungkin tidak diputuskan di tingkatan pengambilan keputusan. Selama ini, sektor pengambilan keputusan penulis nilai menjadi salah satu titik lemah dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor pertahanan dan keamanan.

Berbekal kemampuan sumber daya manusia, harusnya kemandirian industri pertahanan dapat segera terwujud, begitu pula dengan peningkatan kualitas produksinya. Menjawab tantangan ini, diperlukan alih teknologi (*Transfer of Technology*). Kebijakan alih teknologi juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Kita harus berani memaksa negara-negara asing untuk sepakat melakukan alih teknologi kepada kita. Itulah sebabnya faktor kepemimpinan menjadi kunci kebijakan alih teknologi, karena alih teknologi adalah kunci peningkatan sumber daya manusia pertahanan.

Daftar Pustaka

Buku

- Buzan, Barry. 1991. *People States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Collins, Allan (ed). 2010. *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford University Press.
- Dannreuther, Roland. 2007. *International Security: The Contemporary Agenda*. Cambridge: Polity Press.
- Holsti, Kalevi J. 1981. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall.
- Kabashima, Ikuo dan Lynn T. White III (ed). 1986. *Political System and Change*. New Jersey: Princeton University Press.
- Macridis, Roy C. dan Bernard E. Brown. 1996. *Perbandingan Politik*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Mas'ood, Mochtar dan Colin MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Migdal, Joel S. 1988. *Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Perwita, Anak Agung Banyu, dkk. 2013. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peters, Tom dan Nancy Austin. 1985. *A Passion for Excellence, the Leadership Difference*. New York: Random House.

- Saad, Mohammed. 2000. *Development Through Technology Transfer: New Organizational and Cultural Understanding*. Bristol: Intellect.
- Sudarsono, Juwono. 2007. *Postur Pertahanan Negara*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Wirahadikusumah, Agus, dkk. 1999. *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Website

- Antara, "PT DI Gandeng EADS-CASA Produksi Pesawat C295", dalam <http://www.antaraneews.com/berita/247301/pt-di-gandeng-eads-casa-produksi-pesawat-c295>, 23 Februari 2011, diunduh pada 10 Maret 2015.
- Budi Susilo Soepandji, "Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan", dalam <http://ikal.or.id/index.php/strategi-penguatan-sumber-daya-manusia-pertahanan.html>, 2 Oktober 2012, diunduh pada 17 Maret 2015.
- Korem-043-gatam, "Senapan Serbu 2 Produksi PT Pindad", dalam <http://korem-043-gatam.mil.id/info-militer/senjata-produksi-pt-pindad?format=pdf>, 9 September 2011, diunduh pada 10 Maret 2015.
- Militer Indonesia, "4 Kerjasama Militer Indonesia dengan Korea Selatan", dalam http://militerindonesia.net/read/43/4_Kerjasama_Militer_Indonesia_dengan_Korea_Selatan_1, 1 Maret 2015, diunduh pada 17 Maret 2015.
- Pindad, "Pindad Siap Produksi Peluru Tank Leopard", dalam <http://pindad.co.id/pindad-siap-produksi-peluru-tank-leopard>, 6 Juni 2014, diunduh pada 16 Maret 2015.
- Pindad, "Surat Keputusan Nomor: Skep/3/P/BD/X/2005 tentang Kebijakan Alih Teknologi", dalam www.pindad.com/downloads/division/Kebijakan_Alih_Teknologi.pdf, 17 Oktober 2005, diunduh pada 16 Maret 2015.
- Tribun, "Alasan Tank Leopard Tidak Layak Dibeli," dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/19/tank-leopard-tidak-layak-dibeli>, 19 Januari 2012, diunduh pada 16 Maret 2015.

Lain-lain

- Catatan Kuliah *Indonesian Nasional Defense System* pada Universitas Pertahanan Indonesia Jakarta, 20 Juli 2012.

